



# **PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

## **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**TAHUN ANGGARAN  
2013**



## Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013.

Penyusunan Lakip merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2013 ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2011-2016, hal ini merupakan wujud dari keinginan untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean and Good Governance*.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung pada penyusunan lakip ini.

Balikpapan, 26 Pebruari 2014  
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Balikpapan,

**Sutadi. S.Sos. M.M**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19660315 198701 1 001



## Daftar Isi

	<b>Halaman</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	1
<b>Daftar Isi</b> .....	2
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	3
<b>I. Pendahuluan</b> .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
C. Aspek Strategis .....	7
D. Struktur Organisasi .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>II. Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja</b> .....	10
A. Rencana Strategis (RENSTRA) .....	10
1) Visi dan Misi .....	12
2) Tujuan dan Sasaran .....	13
3) Strategi dan Kebijakan .....	15
4) Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013 .....	16
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	17
C. Penetapan Kinerja Tahun 2013 .....	18
<b>III. Akuntabilitas Kinerja</b> .....	21
A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja .....	21
B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan .....	22
<b>IV. Penutup</b> .....	25
A. Kesimpulan .....	25
B. Saran .....	25



## Ringkasan Eksekutif

Program kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan didasarkan pada sasaran strategis target kinerja dan tujuan yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2011-2016, serta Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Periode 2011-2016 secara konsisten, dan berkesinambungan.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan telah menetapkan 12 tujuan strategis, 9 sasaran strategis serta 8 program dan 28 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013.

Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2013 berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja pada program kegiatan mencapai persentase 82.41 % sedangkan realisasi keuangan seluruh program kegiatan mencapai 76.48 %.

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan dari rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Periode 2011-2016.



## Bab I Pendahuluan

### A. Latar Belakang.

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih serta profesional dalam melaksanakan tugasnya diperlukan langkah-langkah dan koordinasi yang optimal sehingga tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel.

Selain itu, diperlukan pula suatu instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.

#### ▪ Landasan Hukum.

Penyusunan LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2012 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara



- Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4410);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
  16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 4).



▪ **Maksud dan Tujuan.**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2013 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Periode 2011-2016.

Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang komprehensif, penyusunan LAKIP ini berperan dan bertujuan sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Periode 2011-2016.

LAKIP ini juga berorientasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

**B. Tugas Pokok dan Fungsi.**

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam rangka melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

▪ **Tugas.**

Melaksanakan perumusan, pengendalian dan penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

▪ **Fungsi.**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan mempunyai fungsi :



1. Perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa, hubungan antar lembaga, pembinaan politik dan pengkajian masalah aktual;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang hubungan antar lembaga dan pembinaan politik;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengkajian masalah aktual;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Aspek Strategis**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 merupakan cara untuk mencapai Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kota Balikpapan. Program dan kegiatan tersebut diharapkan mampu mengakomodir semua prioritas yang harus dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2013 berdasarkan RENSTRA.

Adapun aspek strategis yang merupakan prioritas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2013 yang mengacu pada Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Kesatuan Bangsa berdasarkan 4 (empat) pilar (Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia).
2. Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis ditandai dengan berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur sosial politik, sukses penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan meningkatnya partisipasi dan etika politik masyarakat, serta komunikasi politik berdasarkan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa.



3. Pengembangan kerjasama dan meningkatkan hubungan antar organisasi, lembaga dan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi tentang masalah-masalah aktual, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang terjadi di tengah masyarakat.

#### **D. Struktur Organisasi.**

Adapun susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan sesuai dengan pasal 2 Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2009 terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kesatuan Bangsa;
- d. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Pembinaan Politik;
- e. Seksi Pengkajian Masalah Aktual;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **E. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

**Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi;

**Bab II – Perencanaan Strategis**, menjelaskan tentang gambaran umum yang menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2013;

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2013;



**Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



## Bab II

### Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

#### A. Rencana Strategis.

RPJMD Kota Balikpapan Periode 2011-2016 dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Walikota terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kota Balikpapan adalah :

- a. Memberikan gambaran tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemerintah Kota dalam menyusun Rencana Strategis SKPD periode 2011-2016;
- b. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun RKPD dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan periode 2011-2016;
- c. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota pada akhir masa jabatan.

Adapun penetapan Visi Kota Balikpapan periode 2011-2016 adalah "*Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman*".

sedangkan untuk Misi Kota Balikpapan periode 2011-2016 ada 8 (delapan) yaitu :

1. Meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia yang beriman;
2. Membangun kewirausahaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat;
3. Meningkatkan ketertiban umum, penegakan hukum, pemberantasan KKN dan penanganan masalah sosial;
4. Meningkatkan investasi, memperkokoh ekspektasi dunia usaha, dan memperluas lapangan kerja;
5. Meningkatkan pelayanan publik dan melaksanakan reformasi birokrasi;
6. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan perlindungan anak;
8. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup dan mengembangkan pariwisata serta melestarikan keragaman budaya dan kegotongroyongan.



Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Balikpapan periode 2011-2016 Pemerintah Kota menetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas, yaitu :

1. Mengembangkan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengembangkan pemukiman yang sehat dan layak huni menuju pembangunan yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan mutu pendidikan berbasis kompetensi yang berorientasi dunia kerja;
4. Meningkatkan kualitas kesehatan melalui pengembangan peran serta dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan kota sehat;
5. Membangun sistem infrastruktur, transportasi dan utilitas kota dalam rangka mendukung peningkatan investasi;
6. Memberdayakan masyarakat miskin, UMKMK dan memfasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengembangkan pariwisata dan melestarikan ragam budaya serta kegotongroyongan;
8. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mewujudkan kota ramah anak;
9. **Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam rangka menjaga kondusifitas kota.**

Dari 9 (sembilan) agenda prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan periode 2011-2016 yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan adalah poin kesembilan yaitu *Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam rangka menjaga kondusifitas kota.*

Sebagaimana disebutkan diatas Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2009 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan diberikan tugas untuk melaksanakan perumusan, pengendalian dan penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa, hubungan antar lembaga, pembinaan politik dan pengkajian masalah aktual;



2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang hubungan antar lembaga dan pembinaan politik;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengkajian masalah aktual;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1) Visi dan Misi.

Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

#### a. Visi.

Terwujudnya kehidupan yang dinamis, aman, damai dan menjunjung tinggi nilai persatuan kesatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### b. Misi.

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilakukan yaitu :

1. Pengembangan Kesatuan Bangsa berdasarkan 4 (empat) pilar (Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia).
2. Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis ditandai dengan berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur sosial politik, sukses penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan meningkatnya partisipasi dan etika politik masyarakat, serta komunikasi politik berdasarkan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa.



3. Pengembangan kerjasama dan meningkatkan hubungan antar organisasi, lembaga dan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi tentang masalah-masalah aktual, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang terjadi di tengah masyarakat.
5. Meningkatkan tertib administrasi keuangan, sumber daya manusia, perkantoran serta akuntabilitas pelayanan.

## 2) Tujuan dan Sasaran.

Untuk penerapan dari visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan, terdapat tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

### a. Tujuan.

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keanekaragaman budaya, suku, ras, agama;
2. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis, serta dalam suasana yang demokratis;
3. Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat dalam menghadapi terjadinya berbagai peristiwa bencana;
4. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait maupun dengan komponen masyarakat dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan aktual yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat;
5. Terlaksananya kegiatan penyuluhan penyakit masyarakat, minuman keras, narkoba, perjudian kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum;
6. Tersedianya SDM Organisasi Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya;
7. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran;
8. Terselenggaranya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD dalam bentuk LAKIP;
9. Terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa (BIMTEK).



10. Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan luar daerah;
11. Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan;
12. Tersedianya Sumber Daya Manusia Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan yang profesional, bersih dan berwibawa yang didukung sikap mental dan perilaku disiplin dengan berpegang teguh pada norma hukum dan agama.

b. Sasaran.

Untuk sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama, dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya , pendidikan dan perekonomian tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing serta meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda;
2. Membangun sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik di daerah;
3. Meningkatkan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah kehidupan masyarakat;
4. Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual secara cepat dan tepat.;
5. Menurunnya penyalahgunaan minuman keras, narkoba, perjudian oleh pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum;
6. Meningkatkan kualitas SDM organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya;
7. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Balikpapan;
8. Meningkatkan tertib administrasi keuangan, SDM, perkantoran serta akuntabilitas pelayanan;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Balikpapan.



### 3) Strategi dan Kebijakan

#### a. Isu Strategis.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun pelaksanaannya. Isu strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan pada tahun 2013 yang belum dilaksanakan secara optimal antara lain :

1. Kurangnya koordinasi, komunikasi antar aparat intel terhadap perkembangan situasi dan kondisi.
2. Kurang optimalnya pelaksanaan silaturahmi paguyuban/ormas kedaerahan dengan Walikota Balikpapan.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi, dan bela negara.

#### b. Strategi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka langkah strategis yang perlu dilakukan adalah :

1. Mengoptimalkan fungsi koordinasi, antara anggota KOMINDA, FKDM, FKUB, FPK dan kemitraan ormas lainnya.
2. Mengoptimalkan kuantitas pelaksanaan silaturahmi paguyuban/ormas kedaerahan.
3. Mengoptimalkan kuantitas sosialisasi mengenai wawasan kebangsaan, ideologi, dan bela negara.

#### c. Kebijakan.

Arah kebijakan yang dilakukan dalam mewujudkan terlaksananya program kegiatan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan :

1. Meningkatkan sumberdaya manusia aparat intelijen (Anggota KOMINDA) di daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara anggota KOMINDA dan aparat yang terkait.
3. Meningkatkan kualitas silaturahmi dengan menghadirkan narasumber sehingga silaturahmi tidak hanya sebatas pertemuan saja.



4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan sosialisasi dengan menghadirkan yang kompeten.

#### 4) Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013

Adapun upaya mencapai sasaran, Kantor Kesbangpol Kota Balikpapan pada tahun 2013 merencanakan program dan kegiatan serta menetapkan indikator kinerja dalam pencapaiannya adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan.
  - Penyediaan Makanan dan Minuman.
  - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
  - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
  - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
  - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.
  - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :
  - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama.
  - Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat.
  - Hibauan Melalui Media Massa.
- d. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :
  - Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
  - Lokakarya Integrasi Bangsa (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI).
  - Cinta Tanah Air dan Bela Negara.



- e. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan kegiatan :
  - Deteksi Dini Terhadap Potensi Gejala/Peristiwa Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.
  - Pembinaan Kepekaan Masyarakat Terhadap Situasi Ketertiban dan Keamanan.
- f. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), dengan kegiatan :
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan Orang Asing (NGO).
  - Pencegahan Penyakit Masyarakat.
- g. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan :
  - Penerimaan, Pemeriksaan, Penelitian Berkas Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
  - Penelitian Berkas Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Balikpapan.
  - Desk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim Tahun 2013.
  - Desk Pemilukada (Bantuan Keuangan Provinsi).
- h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
  - Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

## **B. Indikator Kinerja Utama.**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan serta RPJMD periode 2011-2016. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan periode 2011-2016.

Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan yang akan digunakan untuk periode 2011-2016 sesuai periode Renstra, sebagai berikut :



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya Interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama, dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing serta meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah kegiatan silaturahmi dengan tokoh agama dan masyarakat.</li><li>• Jumlah kegiatan silaturahmi dengan Paguyuban dan Ormas.</li><li>• Jumlah sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat.</li></ul>
2	Membangun sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik di daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah parpol yang menerima bantuan keuangan.</li><li>• Jumlah anggota DPRD yang PAW.</li></ul>
3	Meningkatnya rasa aman dan nyaman di tengah-tengah kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersajinya data permasalahan/konflik untuk dijadikan bahan kajian, analisa dan penyelesaiannya.</li></ul>
4	Meningkatnya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual secara cepat dan tepat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah sosialisasi tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.</li></ul>
5	Menurunnya penyalahgunaan minuman keras, narkoba, perjudian oleh pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah keberadaan orang asing.</li><li>• Terselenggaranya penyuluhan tentang Penyakit Masyarakat (PEKAT).</li></ul>
6	Meningkatnya kualitas SDM Organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi kerjasama/ kemitraan.</li></ul>

### C. Penetapan Kinerja Tahun 2013

Untuk penetapan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2013 adalah :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama, dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian tanpa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah kegiatan silaturahmi dengan tokoh agama dan masyarakat</li></ul>	3 kali	<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i> Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Rp. 50.000.000,-



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran
harus menghilangkan identitas masing-masing serta meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah kegiatan silaturahmi dengan Paguyuban dan Ormas</li></ul>	6 Kali	<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>  Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Rp. 223.927.800,-
	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat</li></ul>	1 Kali	<i>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i> Kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Rp. 100.000.000,-
		1 Kali	Kegiatan Lokakarya Integrasi Bangsa (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp. 100.000.000,-
		1 Kali	Kegiatan Cinta Tanah Air dan Bela Negara	Rp. 144.000.000,-
Membangun sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik di daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah parpol yang menerima bantuan keuangan</li><li>Jumlah anggota DPRD yang PAW</li></ul>	13 Parpol  2 Orang	<i>Program Pendidikan Politik Masyarakat</i>  Kegiatan Penerimaan, Pemeriksaan, Penelitian Berkas Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik  Kegiatan Penelitian berkas anggota Pergantian antar waktu (PAW) DPRD Kota Balikpapan	Rp. 52.000.000,-  Rp. 14.550.000,-



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran
	Persentase tingkat partisipasi politik masyarakat	100 %	Kegiatan Desk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Prov.Kaltim 2013	Rp. 278.715.000,-
		100 %	Kegiatan Desk Pemilukada (Bantuan Keuangan Provinsi)	Rp. 750.000.000,-
Meningkatnya rasa aman dan nyaman di tengah-tengah kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>Persentase data permasalahan / konflik untuk dijadikan bahan kajian, analisa dan penyelesaiannya</li></ul>	100 %	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</i> Kegiatan Deteksi Dini Terhadap Potensi Gejala / Peristiwa Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	Rp. 515.120.000,-
Meningkatnya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual secara cepat dan tepat	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah peserta sosialisasi tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah</li></ul>	120 orang	Kegiatan Pembinaan kepekaan masyarakat terhadap situasi ketertiban dan keamanan	Rp. 50.000.000,-
Menurunnya penyalahgunaan minuman keras, narkoba, perjudian oleh pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.	<ul style="list-style-type: none"><li>Persentase keberadaan orang asing</li><li>Jumlah peserta penyuluhan tentang PEKAT</li></ul>	100 %  120 orang	<i>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</i>  Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemantauan orang asing (NGO)  Kegiatan Pencegahan Penyakit Masyarakat	Rp. 55.075.000,-  Rp. 45.000.000,-



### Bab III

## Akuntabilitas Kinerja

### A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2013 diukur dari tingkat capaian keberhasilan tujuan dan sasaran strategis. Mengacu pada RPJMD Tahun 2011-2016, dan juga pada rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2013.

Pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 8 (delapan) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dibagikan kepada masing-masing seksi yang membidangi.

Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah diuraikan diatas, dilakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran.

Berikut evaluasi capaian kinerja tahun 2013 :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama, dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing serta meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda	▪ Jumlah kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan dengan tokoh agama, Paguyuban, dan Ormas dengan Pemerintah Kota.	5 kali	3 kali	50 %
	▪ Jumlah sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat	3 kali	3 kali	100 %
Membangun sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik di daerah	▪ Jumlah partai politik yang menerima bantuan	13 parpol	13 parpol	100 %
	▪ Jumlah anggota DPRD yang PAW	2 org	2 org	100 %
	▪ Persentase tingkat partisipasi politik masyarakat	100 %	62.25%	62.25 %
Meningkatnya rasa aman dan nyaman di tengah-tengah kehidupan masyarakat	▪ Persentase data permasalahan/ konflik untuk dijadikan bahan kajian, analisa dan penyelesaiannya	100 %	100 %	100 %



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual secara cepat dan tepat	▪ Jumlah peserta sosialisasi tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah	120 orang	75 orang	62.50 %
Menurunnya penyalahgunaan minuman keras, narkoba, perjudian oleh pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.	▪ Persentase keberadaan orang asing	100 %	100 %	100%
	▪ Jumlah peserta penyuluhan tentang PEKAT	120 orang	80 orang	67 %

## B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran dan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2013 dari program kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

### 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :

- *Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama*, berupa sosialisasi mengenai forum kerukunan umat beragama, target peserta sebanyak 70 orang dan tingkat partisipasi kehadiran 45 orang di 3 (tiga) Kecamatan. Pagu dana kegiatan sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.695.060,- (81.39%).
- *Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat*, berupa silaturahmi walikota dengan pengurus ormas, paguyuban sebanyak 3 (tiga) kali. Pagu dana kegiatan sebesar Rp. 223.927.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 110.495.000,- (49.34%).

### 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :

- *Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan*, berupa sosialisasi untuk memahami ideologi dan wawasan kebangsaan Indonesia, target peserta sebanyak 300 orang dan tingkat partisipasi kehadiran 250 orang dari unsur ormas dan mahasiswa. Pagu dana kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 93.289.436,- (93.29%).
- *Lokakarya Integrasi Bangsa (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia)*, target peserta sebanyak 300 orang dan tingkat partisipasi kehadiran 300 orang dari unsur Guru, Tokoh Pemuda, Tokoh



Masyarakat, pengurus Ormas. Pagu dana kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.395.636,- (91.40 %).

- *Cinta Tanah Air dan Bela Negara*, target peserta sebanyak 360 orang dan tingkat partisipasi kehadiran 263 orang dari unsur masyarakat/pengurus RT di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur dan Balikpapan Selatan. Pagu dana kegiatan sebesar Rp. 144.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 130.892.636,- (90.90 %).
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan :
- *Penerimaan, Pemeriksaan, Penelitian Berkas Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Parai Politik*, jumlah parpol yang menerima bantuan keuangan sebanyak 13 partai politik. Pagu dana kegiatan sebesar Rp. 52.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.000.000,- (100 %).
  - *Penelitian Berkas Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Balikpapan*, jumlah anggota DPRD yang PAW sebanyak 2 anggota. Pagu dana kegiatan sebesar Rp. 14.550.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.700.000,- (73.54%).
  - *Desk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim 2013*, target partisipasi politik masyarakat 100% dan realisasi tingkat partisipasi 62.25 %. Pagu dana kegiatan sebesar Rp. 278.715.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 252.824.000,- (90.71%).
  - *Desk Pemilukada (Bantuan Keuangan Provinsi)*, target partisipasi politik masyarakat 100% dan realisasi tingkat partisipasi 62.25 %. Pagu dana kegiatan sebesar Rp. 750.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 222.750.000,- (29.70%)
4. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan kegiatan :
- *Deteksi Dini Terhadap Potensi Gejala/Peristiwa Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan*, target penanganan masalah yang dilakukan 100%. Pagu dana kegiatan sebesar Rp. 515.120.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.407.746.000,- (79.16%).
  - *Pembinaan Kepekaan Masyarakat Terhadap Situasi Ketertiban dan Keamanan*, target peserta sosialisasi 120 orang, dan tingkat partisipasi kehadiran 80 orang. Pagu dana kegiatan sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.285.200,- (88.57%).



5. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat, dengan kegiatan :
  - *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan Orang Asing (NGO)*, target kegiatan 100%. Pagu dana kegiatan sebesar Rp. 55.075.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.830.000,- (74.14%).
  - *Penyuluhan Penyakit Masyarakat*, target peserta 120 orang dan tingkat partisipasi kehadiran sebanyak 80 orang. Pagu dana kegiatan sebesar Rp. 45.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.262.800,- (95.14%).



## BAB. IV

### Penutup

#### A. Kesimpulan.

Kantor Kesbangpol Kota Balikpapan merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas dan tanggungjawab dalam urusan kesatuan bangsa dan pembinaan politik dan keorganisasian di wilayah kota Balikpapan juga pengkajian masalah aktual dalam hal menjaga kondusifitas kota agar tetap aman dan nyaman dihuni bagi siapa saja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2013 ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2011–2016 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2013. Berbagai capaian strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan secara menyeluruh.

#### B. Saran.

Percepatan program dan kegiatan pada awal tahun anggaran perlu segera dilakukan, agar pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan terhadap staf pelaksana kegiatan perlu terus digalakan dan dibina serta dilakukan pengawasan oleh atasan langsung untuk memastikan semua kegiatan berjalan dengan baik.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini dibuat, untuk diketahui dan dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Kapten Pierre Tendean RT. 29 No. 1 Telp (0542) 424540 Fax. (0542) 415217  
**BALIKPAPAN**

KODE POS 76112

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR : 188.03/ 15 /KBP/I/2014

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2011-2016**

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;

b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2011-2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nonior 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 08 Oktober 2008);
10. Perda Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah;
11. Peraturan Walikota Balikpapan, Nomor : 17 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan;
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016.

Pasal 1

- 1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dan target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- 2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2011- 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama, dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing serta meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kegiatan silaturahmi dengan tokoh agama dan masyarakat.</li> <li>• Jumlah kegiatan silaturahmi dengan Paguyuban dan Ormas.</li> <li>• Jumlah sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat.</li> </ul>	Kantor Kesbangpol
2	Membangun sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah parpol yang menerima bantuan keuangan.</li> <li>• Jumlah anggota DPRD yang PAW.</li> </ul>	Kantor Kesbangpol
3	Meningkatnya rasa aman dan nyaman di tengah-tengah kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersajinya data rawan konflik</li> <li>• Jumlah rakor keamanan dengan aparat keamanan dan stake holder.</li> </ul>	Kantor Kesbangpol
4	Meningkatnya kemampuan deteksi dini dan cegah dini masyarakat terhadap ancaman dan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah sosialisasi tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.</li> <li>• Jumlah Forum Kewaspadaan dini masyarakat</li> </ul>	Kantor Kesbangpol
5	Meningkatnya pemahaman terhadap penyalahgunaan minuman keras, narkoba, perjudian oleh pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah sosialisasi/penyuluhan tentang Penyakit Masyarakat (Pekat)</li> <li>• Jumlah keberadaan orang asing.</li> </ul>	Kantor Kesbangpol
6	Meningkatnya kualitas SDM Organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi kerjasama/ kemitraan.</li> </ul>	Kantor Kesbangpol

Pasal 2

Unit kerja di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 09 Januari 2014

Kepala Kantor  
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan,

  
**SUTADI**  
NIP. 19660315 198701 1 001

Rancangan Rencana Kerja SKPD Kantor Kesbang dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2013

Seksi: Hubungan Antar Lembaga dan Pembinaan Politik (Halbinpol)

Kode Program Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2013				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1.19.1.19.01.17. 1.19.1.19.01.17.02.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan masyarakat	Masukan : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu  Keluaran : Terjalannya silaturahmi antara Walikota dan FKPD dengan pengurus Paguyuban  Hasil : Tercapainya peningkatan rasa persatuan dan kesatuan antar pengurus Ormas dalam rangka menjaga kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	21 orang Rp 300,000,000 1 Paket 12 Bulan  6 kegiatan  100%	Balikpapan	100%	Rp 300,000,000	APBD	
1.19.1.19.01.21. 1.19.1.19.01.21.08	Program Pendidikan Politik Masyarakat Penerimaan, Pemeriksaan, Penelitian Berkas Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Masukan : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu  Keluaran : Penyaluran bantuan keuangan kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Balikpapan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009	8 orang Rp 75,000,000 1 paket 12 bulan  13 Partai Politik	Balikpapan	100%	Rp 75,000,000	APBD	

		<p>Hasil : Terselenggaranya kegiatan pendidikan politik masyarakat oleh Partai Politik dan kegiatan operasional sekretariat Partai Politik</p>	100%					
1.19.1.19.01.21.09	<p>Penelitian Berkas Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Balikpapan</p>	<p>Masukan : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu</p> <p>Keluaran : Terlaksananya Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota yang terpilih dalam Pemilu Legislatif 2009</p> <p>Hasil : Terselenggaranya penyelenggaraan fungsi legislatif pada pemerintahan daerah Kota Balikpapan</p>	<p>11 orang Rp 40,000,000 1 paket 12 bulan</p> <p>2 anggota DPRD Kota</p> <p>100%</p>	Balikpapan	100%	Rp 40,000,000	APBD	
1.19.1.19.01.21.10	<p>Desk Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013</p>	<p>Masukan : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu</p> <p>Keluaran : Tersedianya fasilitas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Th. 2013</p> <p>Hasil : Tercapainya penyelenggaraan Pemilihan gubernur Th. 2013</p>	<p>33 orang Rp 700,000,000 1 paket 12 bulan</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	Balikpapan	100%	Rp 700,000,000	APBD	

1.19.1.19.01.23.	Program Peningkatan, Pemeliharaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri							
1.19.1.19.01.23.01.	Sosialisasi Kerjasama PEMDA, ORMAS dan Lembaga Nirlaba Lain	<p>Masukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM 15 orang</li> <li>- Dana Rp 400,000,000</li> <li>- Sarana Prasarana 1 paket</li> <li>- Waktu 1 bulan</li> </ul> <p>Keluaran :</p> <p>Tercapainya kerjasama Pemda dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam bidang Kesbangpoldagri 100%</p> <p>Hasil :</p> <p>Terciptanya kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Ormas/LSM 100%</p>		Balikpapan	100%	Rp 400,000,000	APBD	

Rancangan Rencana Kerja SKPD Kantor Kesbang dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2013

Seksi: Pengkajian Masalah Aktual (PMA)

Kode Program Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2013				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1.19.1.19.01.19.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan							
1.19.1.19.01.19.02.	Deteksi Dini Terhadap Potensi Gejala / Peristiwa Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	<p>Masukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM 25 orang</li> <li>- Dana Rp 750,000,000</li> <li>- Sarana Prasarana 1 Paket</li> <li>- Waktu 12 Bulan</li> </ul> <p>Keluaran :</p> <p>Terbentuknya koordinasi dengan personil KOMINDA dan petugas lapangan pencari dan pengumpul informasi untuk menganalisa data yang akurat, tepat dan cepat dalam memberikan informasi mengenai masalah aktual</p> <p>100%</p> <p>Hasil :</p> <p>Terhimpunnya data sebagai bahan alternatif untuk pengambilan kebijakan pimpinan dalam memelihara tegak dan kokohnya NKRI</p> <p>10 buku</p>		Balikpapan	100%	Rp 750,000,000	APBD	

Kode Program Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2013				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1.19.1.19.01.19.03	Pembinaan Kepekaan masyarakat Terhadap Situasi Ketertiban dan Keamanan	<p>Masukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM</li> <li>- Dana</li> <li>- Sarana Prasarana</li> <li>- Waktu</li> </ul> <p>Keluaran :</p> <p>Membantu deteksi dini setiap kejadian aktual dan mendapatkan informasi awal dari masyarakat</p> <p>Hasil :</p> <p>Terkoordinasinya instansi vertikal dan pengolahan data sebagai bahan masukan kepada pimpinan</p>	<p>13 orang</p> <p>Rp 100,000,000</p> <p>1 paket</p> <p>12 bulan</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	Balikpapan	100%	Rp 100,000,000	APBD	
1.19.1.19.01.20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)							
1.19.1.19.01.20.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan Orang Asing (NGO)	<p>Masukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM</li> <li>- Dana</li> <li>- Sarana Prasarana</li> <li>- Waktu</li> </ul> <p>Keluaran :</p> <p>Terdeteksinya setiap kegiatan orang asing</p> <p>Hasil :</p> <p>Terwujudnya bahan laporan dan pengambilan kebijakan pimpinan dalam rangka stabilitas dan hubungan antar bangsa</p>	<p>8 orang</p> <p>Rp 100,000,000</p> <p>1 paket</p> <p>12 bulan</p> <p>100%</p> <p>20 buku</p>	Balikpapan	100%	Rp 100,000,000	APBD	

Kode Program Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sumber Dana		
1.19.1.19.01.20.09	Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	<p>Masukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM</li> <li>- Dana</li> <li>- Sarana Prasarana</li> <li>- Waktu</li> </ul> <p>Keluaran :</p> <p>Terjadinya pemahaman akan bahaya dampak negatif penyakit masyarakat</p> <p>Hasil :</p> <p>Terselenggaranya penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat, miras, narkoba, praktek prostitusi, peredaran uang palsu, aksi premanisme, tindak penyelundupan, praktek perjudian, eksploitasi anak dibawah umur</p>	<p>13 orang</p> <p>Rp 100,000,000</p> <p>1 paket</p> <p>6 bulan</p> <p>berkelanjutan</p> <p>berkelanjutan</p>	Balikpapan	100%	Rp 100,000,000	APBD	

Rancangan Rencana Kerja SKPD Kantor Kesbang dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2013

Seksi: Kesatuan Bangsa (KESBANG)

Kode Program Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2013				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1.19.1.19.01.17. 1.19.1.19.01.17.01.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Masukan : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu  Keluaran : Ikatan silaturahmi antar umat beragama  Hasil : Toleransi, hormat menghormati diantara umat beragama	17 orang Rp 250,000,000 1 Paket 6 Bulan  1 kali  berkelanjutan	Balikpapan	100%	Rp 250,000,000	APBD	
1.19.1.19.01.18. 1.19.1.19.01.18.01	Bina ideologi dan wawasan kebangsaan	Masukan : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu  Keluaran : Menumbuhkan nilai-nilai ke Indonesiaan  Hasil : Mengetahui, memahami ideologi dan wawasan kebangsaan	15 orang Rp 200,000,000 1 paket 6 bulan  100%  100%	Balikpapan	100%	Rp 200,000,000	APBD	

Kode Program Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2013				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1.19.1.19.01.18.03	Lokakarya integrasi Bangsa (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI)	Masukan : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu  Keluaran : Memahami arti pentingnya Integrasi Bangsa  Hasil : Mengimplementasikan isi dari Pancasila, UUD 1945, bhineka tunggal ika dan mempertahankan negara kesatuan RI	15 orang Rp 200,000,000 1 paket 6 bulan  100%  100%	Balikpapan	100%	Rp 200,000,000	APBD	
1.19.1.19.01.18.04	Cinta Tanah Air dan Bela Negara	Masukan : - SDM - Dana - Sarana Prasarana - Waktu  Keluaran : Membentuk jiwa patriotisme dan nasionalisme  Hasil : Terwujudnya jiwa patriotisme dan nasionalisme yang kuat	18 orang Rp 250,000,000 1 paket 6 bulan  100%  100%	Balikpapan	100%	Rp 250,000,000	APBD	



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013  
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BALIKPAPAN**

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUTADI**

Jabatan : **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
  - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
  - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur serta tertib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 14 Januari 2013

Pihak Kedua,

**H.M. RIZAL EFFENDI**

Pihak Pertama,

**SUTADI**